

Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi

Yefri Joni, Awaluddin, Sinky Adella, Rina Anggraini

Dosen FEBI IAIN Bukittinggi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi
yefrijoni@gmail.com , aawal65@yahoo.com , sinkyadella26@gmail.com ,
rinaanggraini1796@gmail.com

ABSTRACT

As a religion and a system of life, Islam has provided a solution to today's economic problems. Poverty, unemployment, scarcity and economic inequality are economic problems that never end, and even raise new problems. Instruments and principles of Islamic teachings such as Tauhi, Khilafah, Togetherness and justice are basic values that will give happiness to humans in meeting their needs. The principle of monotheism teaches an attitude to always be protected from everything that will damage human life. This principle is revealed to be an integral part of the behavior of consumers, producers and distributors. Absolute Ownership or absolute ownership is Allah SWT and is realized by humans, so this value becomes a part in realizing benefit in fulfilling needs and reducing or even eliminating economic problems such as poverty, unemployment and economic inequality. This problem arises because humans feel that they have all the economic resources and are free to use them without any binding value, even though humans are only given temporary rights in controlling these resources (relative ownership). Real analysis of economic problems will be realized through awareness as a servant of God who is given the mandate to manage this nature, it will bring about sufficient simplicity. The caliphate aspect as an Islamic economic principle provides a way to solve economic problems by maximizing the function of the state as an economic control and controller in order to achieve mutual benefit. While the aspect of justice contributes to solving economic problems by providing space proportionally by always encouraging economic growth through existing economic potential and poverty protection through income distribution (zakat, infaq and shadaqah), justice will be realized together in the frame of brotherhood.

Keywords: Islamic Economic Principles; Solving Economic Problem

ABSTRAK

Sebagai agama dan sistem kehidupan, Islam telah memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi dewasa ini. Kemiskinan, pengangguran, kelangkaan dan ketimpangan ekonomi merupakan suatu persoalan ekonomi yang tak kunjung selesai dibahas bahkan memunculkan persoalan baru. Instrumen dan prinsip ajaran Islam seperti Tauhi, Khilafah, Kebersamaan dan keadilan merupakan nilai dasar yang akan memberikan kebahagiaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip Tauhid mengajarkan sikap selalu terpelihara dari segala hal yang akan merusak kehidupan manusia. Prinsip ini diturunkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perilaku seorang konsumen, produsen dan distributor. Absolut Ownership atau kepemilikan mutlak adalah Allah SWT dan disadari oleh Manusia maka nilai ini menjadi bagian dalam mewujudkan kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan dan mengurangi bahkan menghilangkan persoalan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Munculnya persoalan itu disebabkan manusia merasa dialah yang memiliki segala sumber ekonomi dan dia bebas menggunakannya tanpa ada nilai yang mengikatnya, padahal manusia hanya diberikan hak sementara dalam penguasaan sumberdaya tersebut (relatif ownership). Analisis riil terhadap persoalan ekonomi akan terwujud melalui kesadaran sebagai hamba tuhan yang diberi amanah untuk mengelola alam ini maka akan memunculkan keserhanaan yang berkecukupan. Aspek khalifah sebagai prinsip ekonomi Islam memberikan jalan dalam memecahkan persoalan ekonomi dengan memaksimalkan fungsi negara sebagai kontrol dan pengendali ekonomi agar tercapai kemaslahatan secara bersama. Sedangkan aspek keadilan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah ekonomi dengan memberikan ruang secara proporsional dengan selalu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi ekonomi yang ada dan proteksi kemiskinan melalui pemerataan pendapatan

(zakat, infak dan shadaqah), maka akan terwujud keadilan secara bersama dalam bingkai persaudaraan sesama.

Kata kunci: Prinsip Ekonomi Islam; Penyelesaian Persoalan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pada tatanan teoritis Islam dipahami sebagai suatu system ajaran yang bersifat universal dan komprehensif tentang kehidupan manusia, yang meliputi keseluruhan dimensi termasuk dalam aspek dimensi sosial, politik dan ekonomi. (M.Shadeq, 1992) Setiap muslim harus masuk kedalam sistem Islam secara totalitas dan integral. Dalam artian ajaran Islam harus diamalkan secara keseluruhan tidak menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara sebahagian saja. Keseluruhan ajaran Islam itu merupakan satu kesatuan sitem ajaran yang saling berkorelasi dan bertujuan untuk membawa kebahagiaan manusia didunia dan akhirat. Islam sesungguhnya menyediakan cita-cita kebahagiaan dan kesejahteraan moralitas, etos kerja, manajemen usaha serta apa saja yang dibutuhkan manusia dalam mengelola tujuan hidupnya dalam merealisasikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam kurun waktu yang relative panjang, ajaran Islam tersebut sering disalah artikan oleh orang Islam tu sendiri, dan tercakup didalamnya masalah ekonomi.

Persoalan sekitar ekonomi, khususnya, kurang mendapat atensi serius dari umat Islam sehingga ajaran dalam bidang itu belum dapat berkembang dengan baik. Kurangnya perhatian umat Islam itu sendiri karena faktor kuatnya hegemoni barat terhadap dunia Islam melalui proyek modernisasi yang disuarakan oleh barat, disamping perasaan inferior yang menggejala ditubuh umat Islam itu sendiri. Baru pada pertengahan abad 20 ini tumbuh kecendrungan sementara intelektual Islam yang menjadikan tauhid dan keadilan sebagai komitmen perjuangan yang mewarnai sistem tersebut. (Nasution)

Ajaran Islam tentang ekonomi mendapat perhatian khusus dan mulai berkembang menjadi sebuah sistem yang mempunyai metodologi keilmuan tersendiri dan menjelma menjadi sebuah sistem yang independen.

Situasi seperti yang digambarkan diatas makin berkembang secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Hegemoni institusional dan intelektual yang ditiupkan oleh sistem kapitalis dan sosialis makin redup dan makin banyak ekonomi yang menentang sistem tersebut indikasinya adalah dengan makin banyaknya literature tentang persoalan Islam yang memperlihatkan peningkatan baik dalam aspek kwanritas dan kualitas. Literatur tersebut tidak lagi berbicara pada wilayah argumentasi teoritis tetapi sudah menjurus kepada kerangka aplikatif. Seperti ditandai dengan banyak bermunculan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah.

Menyikapi kemajuan ekonomi Islam sering muncul pertanyaan mulai dari sisi epitimologis sampai yang bersifat pragmatis, bahkan yang bersifat praktis. Pertanyaan muncul terkait dengan ekonomi Islam sebagai keilmuan karena mengandung muatan nilai dan bagaimana kemampuan ekonomi Islam dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dalam bidang ekonomi.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata ekonomi berasal dari kata penggabungan dua kata bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti pengaturan dan pengolahan rumah tangga. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Xenopone seorang filosof Yunani. (Deliarnov, Jakarta) Berhubungan dengan persoalan ekonomi, Xenopone telah menulis satu uraian atau sebuah tulisan yang memuji tentang pertanian sebagai basis kekayaan ekonomi dan mengajukan perdagangan dan perkapalan sebagai usaha yang dapat memajukan perekonomian Negara. (Green, 1997)

Pada masa Yunani kuno sudah ada teori tentang uang bunga, jasa tenaga kerja dan perbudakan serta perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku republik yang ditulis oleh Plato (427-347 SM) atau sekitar 400 tahun sebelum masehi karena dia melahirkan pemikiran paling awal tentang perekonomian banyak dipelajari orang. Tetapi sayang walaupun Plato banyak pemikirannya dipelajari, tetapi pembahasannya tidak sistematis sejalan dengan bentuk suatu masyarakat sempurna ataupun sebagai utopia. (Deliarnov)

Gagasan Plato tentang perekonomian muncul tanpa sengaja dari pemikirannya tentang keadilan dalam sebuah Negara ideal, dimana dia menyatakan bahwa dalam sebuah Negara ideal, kemajuan tergantung kepada pembagian kerja yang tumbuh secara alamiah dalam masyarakat. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ekonom, diantaranya yang dikemukakan oleh A. Marshall yang mengatakan *Economic is a Study of mankind in the ordinary business of life: or economic is a study of the use of scarce resources to satisfy unlimited human wants*. Definisi ini lebih menekankan persoalan perekonomian tersebut sebagai studi tentang upaya yang dilakukan oleh manusia atau individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud disini adalah kebutuhan pokok.

Sedangkan menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang sarana kekayaan bangsa dengan memperhatikan secara khusus pada sebab-sebab materiil dan kemakmuran seperti hasil industri dan pertanian dan sebagainya. (Al-Ashal, 1980) Sehubungan dengan definisi yang dikemukakan oleh Adam Smith diatas dia lebih menekankan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang persoalan kekayaan dengan memalingkan manusia yang mempunyai kemampuan, sedangkan produksi tidak akan sempurna kecuali dihasilkan oleh manusia yang memiliki kreasi dan untuk mereka kembali.

Menyikapi terhadap beberapa pengertian diatas, kalau dianalisa tidak ada satupun definisi yang bebas kritik dan bersifat komprehensif. Karena dari sekian pengertian yang dikemukakan ada kesan ilmu diluar ekonomi terkesampingkan. Dia hanya berkisar pada uraian dan pemecahan pada

gejala ekonomi belaka tidak sampai pada masalah hukum dan budaya politik serta tindakan lain dalam menghadapi gejala ekonomi.

Menghadapi kritik yang ditujukan kepada pengertian diatas maka orang berusaha mengajukan pengertian yang bebas kristik dan pada saat yang sama tercakup lipatan pengertian tersebut yaitu masalah fundamental masalah ekonomi. Untuk mengkafer masalah kontra terkait dengan pengertian ilmu ekonomi tersebut maka pengertian ekonomi yang agak sempurna adalah bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang intinya adalah manusia yang mempunyai kemauan berbuat untuk mempelajari kebutuhan yang banyak dengan memanfaatkan sumberdaya yang terbatas dengan tujuan merealisasikan kebutuhan sebanyak mungkin dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada dan mengembangkan potensi tersebut.

Karena premis utama yang dikaji dalam persoalan ekonomi adalah persoalan pemenuhan kebutuhan hidup walaupun masih berorientasi pada meterialisme, tetapi pada tingkatan tertentu dia masih mengakui aspek spiritual dan moral tetapi dia tidak menempatkan segi rohani dan moral sebagai sesuatu yang berharga.

Secara keseluruhan premis utama yang dikaji dalam persoalan ekonomi adalah persoalan pemenuhan kebutuhan hidup , meskipun berorientasi pada materialisme tetapi pada level tertentu masih mengakui aspek moral dan rohani. Secara keseluruhan sistem ekonomi konvensional memusatkan perhatian pada perilaku individu dan masyarakat guna membuat pilihan untuk memuaskan kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas. Sumberdaya yang terbatas dalam pandangan ekonomi konvensional dianggap sebagai kendala sehingga manusia mesti memaksimumkan pemanfaatannya agar tidak sia- sia. Sumber daya tidak biasa diperoleh secara gratis dan memiliki lahan alternative, penggunaanya baik antar objek pemuas kebutuhan untuk generasi sekarang dan akan datang.

Dengan demikian dimensi pilihan meliputi ruang dan waktu penggunaan sumber daya sebagai konsekuensi pilihan yang diambil mengandung biaya dan manfaat. Adanya biaya dan manfaat menghendaki efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dan selanjutnya manusia sebagai pemilik mutlak sumberdaya karena itu adanya kebebasan untuk mengeksploitasi alam secara individual. Kepentingan diri sendiri dan pasar menjadi petunjuk arah penggunaannya. Peran tuhan yang menciptakan alam tidak masuk dalam pertimbangan manusia dalam menentukan arah penggunaan sumber daya, manusia berhak memanfaatkan apa yang tersedia tanpa ada campur tangan tuhan. Nilai spritualisme tidak mendapatkan tempat yang signifikan dalam pertimbangan pemilikan sumber daya oleh manusia. Ilmu ekonomi dipandang sebagai ilmu yang bebas nilai dimana rasionalitas menjadi pokok utama dalam keputusan dan analisis kebutuhan manusia.

Melihat paradikma yang digunakan oleh system ekonomi konvensional tersebut muncul pertanyaan "apakah tepat untuk menerima ilmu ekonomi sebagai ilmu yang bebas nilai?". Pemahaman - pemahaman terhadap asumsi ekonomi mengenai manusia ,ekonomi memperlihatkan bahwa ilmu ekonomi sebenarnya tidak bebas nilai. Karena itu pengembangan pemilikan ekonomi yang sejalan dengan nilai - nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah - tengah masyarakat adalah lebih efisien dan lebih memiliki arti dibandingkan dengan nialai yang dianut oleh ekonomi konvensional.

Ekonomi Islam diperlukan untuk memberikan kontribusi yang positif dan solusi alternative krisis ekonomi masyarakat yang secara bersamaan mendukung terbentuknya masyarakat madani. Sebuah masyarakat yang tunduk dan menjadikan tauhid sebagai komitmen totalitas kehidupan dalam menata peradaban dunia yang berwawasan futuristik dan spritualistik. Pada tataran epistemologis masih terjadi perdebatan dikalangan ahli terkait dengan keberadaan ekonomi Islam sebagai salah satu disiplin ilmu ekonomi yang mengedepankan tatanan moral dan nilai-nilai spiritual. Para ahli seperti Husain Zaman menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan pengaplikasian petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan alam memperoleh dan mengelola sumberdaya guna memperoleh kepuasan bagi manusia dengan demikian manusia akan melaksanakan tugasnya sebagai hamba tuhan dimuka bumi.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia diperlukan pedoman normative yang dijadikan sebagai standarisasi yang mengarahkan perilaku ekonomi yang tidak akan menimbulkan kerugian dan manipulasi terhadap orang lain. Baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang agar terwujudnya kesejahteraan dikalangan masyarakat pengguna dan pemanfaatan sumberdaya yang sudah disediakan oleh tuhan. Kedudukan nilai-nilai Islam ini yang menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ini tidak berarti bahwa ekonomi Islam bersifat normative melulu tetapi ekonomi Islam merupakan penggabungan antara konsep normative dan positif sedangkan metode pengkajian ekonomi Islam menggunakan gabungan antara deduksi dengan induksi. Defenisi yang agak sempurna disampaikan oleh DR. Umar Chapra yaitu ilmu ekonomi Islam sebagai contoh cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumberdaya langka yang seirama dengan Al-Maqhasid Syariah, serta mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral. (Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Islam, 2001)

Adanya keseimbangan aspek normative dan positif merupakan suatu indikasi bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah system yang menjadi mimpi. Dalam pengertian, ketika sistem ekonomi Islam hanya berpijak pada logika positifistik maka pada waktu itu sistem tersebut telah tercabut dari akarnya, hilang kontrol dan terjadinya proses eliminasi terhadap eksistensi tuhan, begitu juga sebaliknya kalau seandainya sistem ekonomi Islam tersebut selalu bermuatan normative dan spritualistik dengan hanya mengedepankan aspek moral dan rohani yang hanya mengenyampingkan kebendaan dalam kehidupan manusia maka pada akhirnya akan menjadi sistem yang selalu mengawang dan tidak sampai membumi pada realitas empiris kemasyarakatan. Disinilah letak keistimewaan sistem ekonomi Islam dimana mensinergikan antara kerangka berfikir normative dengan empiris.

Islam mengambil jalan tengah antara dua titik ekstrim (antara normative dengan empiris) tersebut, mencoba menempatkan pada proporsi yang tepat dalam membangun sebuah sugesti baru, bahwa kesejahteraan hanya akan bisa terwujud dengan meletakkan kerangka normative dan empiris pada level dan standar yang sama. Pedoman normative dalam ajaran Islam membawa dampak yang serius dalam teori dan praktek ekonomi Islam. Tujuan hidup yang dikehendaki oleh Islam dengan sendirinya menentukan tipe ideal manusia atau masyarakat yang menjadi tujuan aktifitas kegiatan ekonomi. Islam tidak memandang aspek normative sebagai satu-satunya

penilaian yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Setiap nilai dan institusi yang ditekankan oleh Al-Quran dan sunnah pada hakikatnya memiliki sifat sebagai suatu hubungan teoritis antara nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan kausalitas yang selalu dijalankan. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang tengah berjalan. Dia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia hari ini. (Husain, 1986) Sasaran yang dikehendaki oleh Islam bukan hanya material tetapi juga spiritualitas.

Islam mengkonstruksikan konsepnya dengan kebahagiaan dan kehidupan yang baik yang berlandaskan atas persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini disebabkan karena adanya kepercayaan manusia bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Tuhan tanpa memandang kepada kekayaan materi tetapi lebih kepada nilai ketakwaannya yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan dalam aspek ekonomi Islam berusaha untuk merubah keinginan dan hasrat kesukaan manusia dengan konsep keadilan secara bersama dan kultural Islam yang integral adalah bahwa kesejahteraan ekonomi tidaklah merupakan barometer atau alat penting agar manusia tersebut dapat mencapai kebahagiaan secara totalitas.

Sebuah garis besar dari fungsi kesejahteraan dalam ekonomi Islam tersebut yang berlandaskan pada filosofi moral itu sendiri dari prinsip dan nilai esensial dari keseluruhan sistem ekonomi Islam tersebut. Maka pembahasan berikut dalam tulisan ini adalah membicarakan tentang prinsip ekonomi Islam tersebut diantaranya:

1. PRINSIP TAUHID

Tauhid merupakan batu fondasi keimanan Islam. Pada konsep ini muara semua pandangan dunia dan strateginya. Tauhid mengandung sebuah komitmen totalitas bahwa alam semesta diciptakan secara sadar oleh Tuhan yang Maha Esa yang bersifat Esa dan menciptakan secara bertahap untuk kepentingan manusia.

Paradigma tauhid merupakan suatu pengakuan akan adanya kekuatan supranatural diluar diri manusia yang senantiasa mengawasi aktifitas manusia. Lebih jauh tauhid dalam dimensinya yang lebih dalam tidak cukup dengan hanya sikap batin yang hanya percaya akan adanya eksistensi Tuhan tapi menutup lahirnya atau eksternalisasinya dalam setiap tindakan built in dalam aktifitas ekonomi.

Dalam pengertian ini tepatlah kiranya dipahami sabda nabi yang mebayatakan " bahwa suatu aktifitas yang tidak didahului dengan mengucap basmalah maka tidak akan ada nilai kontinuitasnya (terputus)".

Basmalah mengandung makna yang sangat mendasar bahwa Tuhan menjadi basis fundamental bagi semua aktifitas manusia. Tauhid merupakan kunci untuk melepaskan diri segala ikatan eksternal selain Tuhan dan dijadikan sebagai star untuk meluangkan pada jalan berikutnya.

Tauhid ini direpleksikan dalam komitmen umatnya terhadap persaudaraan universal manusia, bukan hanya sebatas slogan kosong, melainkan sebagai konsep hidup yang menyamakan kehidupan sosial tanpa diskriminasi sosial. Islam menyediakan nilai dasar institusi yang akan membantu manusia merealisasikan impiannya yaitu akan adanya suatu masyarakat egaliter yang

bertanggung jawab dimana setiap individu bertanggung jawab dihadapan Allah s.w.t terhadap apa yang telah dilakukannya.

Juga dalam interaksi sesama manusia. Tauhid adalah kata kunci dalam jalinan ikatan emosional antar sesama ketika hal ini hilang sulit untuk menciptakan suatu masyarakat yang beriman yang kaya dengan nilai-nilai spiritualisme.

2. PRINSIP KHALIFAH

Manusia diutus oleh tuhan kemuka bumi adalah sebagai khalifah untuk dipersiapkan sebagai wakil tuhan dimuka bumi yang akan mengemban misi suci untuk mengelola alam semesta ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Albaqarah ayat 30 yang artinya:

“Ingatlah ketika tuhan mu berfirman sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah dimuka bumi”.

Sebagai wakil tuhan dimuka bumi manusia sudah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materil yang memungkinkannya hidup dan mengemban misi suci secara efektif.

Dalam rangka fungsi kekhalifahannya, manusia mampu berfikir, memilih dan memilah mana yang baik dan terbaik untuknya dalam rangka melakukan revolusi sosial di tengah –tengah masyarakat. Dengan potensi fitrahnya manusia diharapkan mampu meningkatkan kualitas dirinya dihadapan manusia dan dihadapan tuhan. Artinya dengan mengemban misi suci sebagai representasi tuhan dimuka bumi maka sudah menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk menampilkan sifat - sifat ketuhanan sesuai dengan Asmaul Husna.

Disamping itu meskipun manusia sudah diberi mandat untuk mengatur pengelolaan alam semesta bukan berarti secara bebas dan totalitas dan tanpa kontrol. Tetapi pengelolaan tersebut mesti dilakukan secara efisien dan memperhatikan nuansa kemaslahatan sehingga kemakmuran yang merupakan harapan bersama teralisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini hanya terlaksana jika pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam satu margin yang dibimbing oleh petunjuk tuhan dalam kerangka Maqasid As Syariah.

Dijadikannya Maqasid As Asyariah sebagai kerangka acuan dalam setiap praktek perekonomian didasarkan pada keyakinan bahwa manusia sebagai wakil tuhan dimuka bumi adalah satu sosok yang mulia dan terhormat. Ia diciptakan bukan tanpa alasan yang pasti dan secara sia –sia. Inilah sebenarnya esensi dari pengertian ibadah atau persembahan dalam pengertian Islam.

3. KERANGKA ACUAN DAN KERANGKA KERJA HARUS ISLAMI (Antonio, 2011)

Dalam setiap aktifitas perekonomian secara umum kerangka kerja yang digunakan harus Islami sesuai didalam surat Al Baqarah ayat 168 yang artinya “ Hai sekalian manusia , makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat dibumi ini, dan jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagim”.

Dalam pengertian yang lebih kongkrit Islam menganjurkan umatnya dalam memenuhi kebutuhan dengan cara yang Islami sesuai dengan ajaran agama Islam dan menolak secara tegas

suatu kebatilan yang dianggap bertentangan dengan prinsip ajaran Islam termasuk menjauhkan diri dari unsur riba. Pemenuhan kebutuhan dengan cara batil akan menimbulkan dampak sosial yang tidak baik karena adanya pilihan atau masyarakat yang dirugikan dari perilaku seperti itu.

4. PERSAUDARAAN UNIVERSAL

Persaudaraan dalam Islam merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT. Persaudara merupakan kekuatan umat Islam dan misi suci untuk membentuk tatanan social kemasyarakatan yang solid dalam satu ikatan keimanan kepada Allah s.w.t dan berbuat ihsan kepada sesama. Dalam konteks ini setiap individu dalam satu masyarakat diikat oleh suatu ikatan persaudaraan dan kasih sayang yang diilustrasikan bagaikan satu anggota tubuh jika satu anggota tubuh yang sakit maka akan sakit semuanya. Sebuah ikatan yang universal yang tidak dibatasi oleh batas geografis, ras, etnik dan golongan seperti yang dijelaskan dalam firman ALLah dalam surat al-hujarat ayat 13 yang artinya:

“Hai sekalian manusia sesungguhnya aku ciptakan kamu dari golongan laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal”.

Konsep persaudaraan yang universal memberikan implikasi pada persamaan sosial dan mengangkat harkat dan martabat semua manusia, tanpa harus ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu Islam menganjurkan harus ada kesamaan ekonomi dengan cara mendukung dan menggalakan persamaan sosial hingga sampai kepada kekayaan Negara yang tersedia yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tetapi dirasakan oleh semua manusia.

5. PRINSIP KEADILAN

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur’an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Al-quran mencapai lebih dari seribu kali yang berarti ; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata *Allah* dan *‘Ilm*. Bahkan, Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat Al-Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dll (Majid Kahduri, *The Islamic Conception of Justice* (1984), hlm 10). Karena itu, tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan / kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

Begitulah, penekanan Islam pada penegakkan keadilan sosio ekonomi. Maka, adalah keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan, “Hanya ideologi kami yang berbicara dan bertindak tegas dalam masalah keadilan. “Setidaknya hanya kamilah yang mempunyai komitmen kuat tentang nilai-nilai keadilan”. Itulah klaim yang dilontarkan berbagai komponen masyarakat dunia dalam kerangka memperlihatkan keunggulan ideologi atau kepercayaan yang mereka anut. Harus di bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama

manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan – tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat). Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar. Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan akibat tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan *transfer payment*.

Jadi, konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya. (Minka, 2014)

Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengancam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedekah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya. Al-Quran dengan tegas mengatakan, “*Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu*” (QS. 59:7), “*Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta*” (QS. 70:24).

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan.

Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan *an sich* bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Islam tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat islam dan manusia secara umum, dimana sistem nilai dan prinsip dasar ajaran islam menggariskan bahwa tujuan dalam kehidupan ini adalah untuk pengabdian kepadanya. Pengabdian kepada Allah SWt diwujudkan dalam kerangka *Hablum minallah* dan *Hablum Minannas*. Terkait dengan hubungan sesama manusia dalam bidang ekonomi islam menggariskan nilai dan prinsip dasar seperti tauhid, keadilan, khalifah dan persaudaraan sebagai dasar dalam bersikap dan berbuat untuk tercapai tujuan pengabdian. Prinsip Tauhid mengajarkan sikap selalu terpelihara dari segala hal yang akan merusak kehidupan manusia. Prinsip ini diturunkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perilaku seorang konsumen, produsen dan distributor. Absolut Ownership atau kepemilikan mutlak adalah Allah SWT dan disadari oleh Manusia maka nilai ini menjadi bagian dalam mewujudkan kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan dan mengurangi bahkan menghilangkan persoalan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Munculnya persoalan itu disebabkan manusia merasa dialah yang memiliki segala sumber ekonomi dan dia bebas menggunakannya tanpa ada nilai yang mengikatnya, padahal manusia hanya diberikan hak sementara dalam penguasaan sumberdaya tersebut (relatif ownership). Analisis riil terhadap persoalan ekonomi akan terwujud melalui kesadaran sebagai hamba tuhan yang diberi amanah untuk mengelolah alam ini maka akan memunculkan keserhanaan yang berkecukupan. Aspek khalifah sebagai prinsip ekonomi islam memberikan jalan dalam memecahkan persoalan ekonomi dengan memaksimalkan fungsi negara sebagai kontrol dan pengendali ekonomi agar tercapai kemaslahatan secara bersama. Sedangkan aspek keadilan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah ekonomi dengan memberikan ruang secara proporsional dengan selalu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi ekonomi yang ada dan proteksi kemiskinan melalui pemerataan pendapatan (zakat, infak dan shadaqah), maka akan terwujud keadilan secara bersama dalam bingkai persaudaraan sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Berbentuk Buku:

Al-Ashal, A. M. (1980). *System Ekonomi Islam: Prinsip dan Tujuannya*. Surabaya.

Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah Antonio*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Chapra, U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Chapra, U. (n.d.). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Deliarnov. (Jakarta). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. 1995: Rjawali Press.

Green, M. (1997). *Buku Pintar Ekonomi*. Jakarta: Budi Mulia Madani.

Husain, S. A. (1986). *Sistem Rekayasa Social Dalam Islam*. Jakarta: Dirjen Lembaga Islam.

M.Shadeq, A. A.-H. (1992). *Finacing Economic Development Islamic and Minstream Aproach*. Malaysia: Petaling Jaya Longaman.

Pustaka Seminar Prosiding:

Minka, A. (2014). Materi Pada Pelaksanaan Sekolah Psar Modal Stariah. Solok: Universitas Muhammad Yamin Solok.

Nasution, M. (n.d.). Pemberdayaan Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraa Ekonomi Islam. Stain Sjek Djamil Djambek Bukittinggi.